

## **PENGARUH PERGESERAN STRUKTURAL BIROKRASI TERHADAP PEMANFAATAN PROGRAM SIARAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN DI INDONESIA**

**Oleh: Wahyudi**

**Balai Pengembangan Media Radio Pustekkomdiknas**

### **Abstracts**

The radio as a type of audio media represents a product of communication technology coming into birth as media of entertainment, information, and education. Study and development on such media for the sake of the three functions are based on audience characteristics, program materials, and technical development related to the technology to make communication occur more effectively. As one purpose of the utilization of the radio media is education, the utilization and development of such audio media for education have actually been going on a long time in Indonesia. But, though research results and empirical evidence related to the utilization of the radio media in Indonesia have once experienced their times of glory, they have now been decreasing.

Trends or inclination factors in the current fast growing audio-visual media are not the only causes of the decreasing utilization of the radio media in education. Changes or shifts in the structure of organizational bureaucracy have had a greater influential role in decreasing the utilization of the radio media for education in Indonesia. However, with all the superiority in their command, such media may still be increasingly developed. The strategies employed may be, among others, knowing changes in audience and stake holder characteristics, implementing product variation, improving cooperative activities with stake holders, conducting proactive promotion, and establishing school funds for audio media.

**Key words:** bureaucracy, educational radio broadcasting

## **Pendahuluan**

**B**agi para pengembang pembelajaran, media audio atau radio dianggap media yang ekonomis dan praktis yang pada praktiknya dapat menyampaikan informasi untuk banyak hal dalam pelajaran. Sebagai sebuah media, media audio memiliki banyak kelebihan, walaupun ada pula kelemahannya. Dalam sejarah panjangnya media audio telah digunakan secara luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia, Samoa, Kenya, Mexico, Korea, Malaysia, dan lain-lain. Thailand telah menggunakan lebih dahulu daripada Indonesia untuk keperluan pendidikan. Artinya, mereka lebih berpengalaman dalam hal penggunaan media radio untuk pendidikan. Keefektifan media audio yang dianggap berkurang saat ini tidak seluruhnya benar. Masalahnya adalah bagaimana mengintegrasikan secara tepat di dalam sebuah kurikulum agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan efektif. Persoalan media pada umumnya bukan bagus atau jeleknya, kuno atau modernnya, tetapi tepat tidaknya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirancang.

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai antitesis dari UU No. 5 Tahun 1974 yang berlaku sejak 1 Juni 2001, secara esensi membuka kran kebebasan pengelolaan masing-masing daerah berupa wewenang yang cukup luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, misalnya meningkatkan pendapatan asli daerah dan layanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan.

Otonomi atau desentralisasi berarti jauh dari pusat, mendekatkan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sistem pengelolaan pemerintahan ini dianggap lebih baik daripada sistem sentralistik. Strategi apa saja yang dapat ditempuh untuk dapat mengembangkan program siaran radio pendidikan sehubungan dengan perubahan struktur birokrasi di Indonesia?

## **Perspektif Perubahan Pemerintahan dan Implikasinya**

Pengaruh globalisasi semakin kuat dan nyata dirasakan oleh masyarakat, termasuk dalam praktik penyelenggaraan negara,

terutama negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Instrumen globalisasi yang sangat berpengaruh adalah 3I, *Information, Investment and Idea*. Informasi dapat tersebar bebas melalui media apa saja, baik media visual, audio atau media audio visual, dan mempengaruhi/menyebarkan kebebasan, demokrasi dan HAM. Investasi dapat melalui Bursa Efek. Orang dapat menanamkan dan menarik modal secara bebas di suatu negara. Dengan demikian, negara tidak bisa lagi mengontrol berbagai bidang yang selama ini pernah dikontrol oleh pemerintah. Bidang-bidang itu misalnya regulasi perdagangan keluar, telkom, dan transaksi keuangan. Pemerintah tidak bisa mengontrol aliran barang dan jasa, idea dan produk bendanya (Syah, 1999: 107-108).

Perspektif perubahan teoretis pemerintahan sebagai praktik memerintah menjadi *governance* yang diistilahkan UNDP untuk menggantikan interaksi antarnegara, pengusaha swasta dan masyarakat sipil memiliki 3 alasan seperti berikut.

1. Tumbuh kesadaran bahwa pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan.
2. Bentuknya tradisional dan modern berupa interaksi masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan isu-isu tersebut.
3. Pengaturan dan mekanisme memerintah akan berbeda dengan sektor ke sektor (Wasistiono, 2002:31).

### **Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah**

Sejalan dengan perubahan paradigma tata kehidupan bernegara, terjadi perubahan secara mendasar struktur organisasi di Indonesia dan membawa konsekuensi logis terhadap pembiayaan, jenis, dan jumlah organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Tahun 1999 dan UU Perimbangan Keuangan Tahun 2000, banyak jenis dan jenjang organisasi dalam struktur birokrasi yang terkena *review* dengan tujuan mengefektifkan dan mengefisienkan organisasi pemerintahan/birokrasi. Pemerintahan Daerah menghendaki pembiayaan pembangunan berada di daerah, sedang pusat menginginkan

*status quo*, dengan dalih menjaga kesatuan wilayah negara yang luas ini. Namun hal demikian itu sudah kurang mendapat sambutan karena bertentangan dengan semangat desentralisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis.

Pada waktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi *review* organisasi birokrasi secara besar-besaran. Departemen Sosial dan Departemen Penerangan menjadi sasarannya dengan alasan bahwa pada era demokrasi, lembaga penyalur informasi yang pro-pemerintah yang lebih dikuasai oleh suatu rezim menghambat demokratisasi di bidang komunikasi dan informasi. Departemen Penerangan pada waktu itu dianggap sebagai corong kepentingan pemerintah. Departemen Sosial dianggap kinerjanya kurang efektif dan menjadi sumber korupsi. Bantuan yang seharusnya disampaikan kepada yang berhak, sering tidak tersalurkan dan masyarakat dianggap mampu menanggulangi suatu bencana yang menimpanya.

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan penerangan/informasi oleh Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah diberlakukan siaran radio untuk pendidikan yang disiarkan secara nasional yang pelaksanaannya merupakan kerja sama antara Pustekomdiknas, RRI, Dikgudentis, dan Universitas Terbuka. Dalam sejarah panjangnya pernah mengalami masa jaya, namun sekarang telah mengalami masa surut.

Dalam artikel ini akan dibahas pengaruh pergeseran peran pengelola penyelenggaraan siaran radio pendidikan, yaitu pemerintah dan implikasinya terhadap jumlah produksi dan penyiarannya.

### **Siaran Media Radio Pendidikan**

Media radio atau audio merupakan media yang praktis, murah, dan mudah disiapkan, serta efektif asal direncanakan dengan tepat dan baik. Radio telah banyak digunakan di berbagai negara. Media radio dapat digunakan secara tunggal atau radio saja, dikombinasikan dengan bahan cetak, dan film bingkai atau film tanpa suara. Masing-masing memerlukan teknik pengembangan naskah yang berbeda-beda.

Banyak kelebihan yang dapat diperoleh dengan menggunakan media radio dalam pendidikan (Sadiman, 1986:52-53).

1. Harganya relatif murah dan variasi programnya lebih banyak daripada TV.
2. Sifatnya mudah dipindahkan (*mobile*).
3. Jika digunakan secara bersama-sama dengan alat perekam audio bisa mengatasi problem jadwal.
4. Radio dapat merangsang imajinasi anak.
5. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengar.
6. Dapat memusatkan perhatian siswa pada kata-kata yang digunakan pada bunyi dan artinya.
7. Siaran lewat suara terbukti amat cocok untuk mengajarkan bahasa dan musik.
8. Dapat mengerjakan hal-hal tertentu secara lebih baik, misalnya menampilkan guru yang benar-benar ahli pada bidangnya.
9. Radio dapat mengerjakan hal-hal yang tidak dikerjakan oleh guru, misalnya menyajikan pengenalan luar.
10. Radio dapat mengatasi batasan ruang dan waktu.

Di samping kelebihan-kelebihan yang dikemukakan tadi, Ronald Anderson juga mengemukakan hal senada, seperti berikut.

1. Materi pelajaran sudah tetap, terpatrit, dan dapat direproduksi dengan kualitas tetap.
2. Produksi dan reproduksi sangat ekonomis, dan mudah didistribusikan.
3. Peralatan program radio termasuk yang paling murah jika dibandingkan dengan media audio-visual lainnya.
4. Untuk program pengajaran mandiri yang canggih, sudah ada peralatan yang dapat menyelaraskan visual dengan program audio yang terekam.
5. Dengan berbagai teknik perekaman dapat digunakan untuk belajar mandiri.
6. Suasana dan perilaku siswa dapat dipengaruhi melalui penggunaan musik dan efek suara.

Namun demikian, diakui juga baik oleh Sadiman maupun Anderson bahwa media radio juga memiliki kelemahan, yaitu sebagai berikut.

1. Sifat komunikasinya satu arah.
2. Biasanya siarannya disentralisasikan, sehingga guru tidak dapat mengontrolnya.
3. Penjadwalan pelajaran dan siaran sering menimbulkan masalah. (Sadiman,).

Anderson juga menunjukkan 6 kelemahan media radio, yaitu:

1. perlu sangat hati-hati apabila hanya radio yang digunakan;
2. perbaikan biasanya menuntut diproduksi ulang;
3. masalah pendistribusian akan timbul bila produksi gambar diselaraskan dengan audio;
4. pengembang naskah yang baik memerlukan latihan khusus;
5. perlu berkali-kali memperkirakan kecepatan penyajian materi; dan
6. siswa kesulitan bila diselaraskan dengan gambar tetapi ternyata tidak selaras dengan gambar (Anderson, 1983: 132-133).

### **Pengalaman Negara Lain**

Media radio benar-benar telah berperan dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan di bidang pendidikan dan pembangunan di banyak negara. Tidak saja sebagai suplemen, tetapi berperan sebagai program pokok. Di Amerika Serikat telah digunakan secara baik, sebagaimana dilaporkan oleh Jamison, dkk. (1978:31), "*Radio has been used extensively for formal classroom instructional in the United States else where.*"

Di samping itu, di Nicaragua telah dijalankan Proyek Matematika melalui radio tahun 1975. Laporan hasil tes tahun 1976 menunjukkan penguasaan 67% bagi yang belajar dengan media radio dan 58% bagi siswa yang tidak menggunakan radio. Mexico menggunakan radio untuk pendidikan tahun 1955. Di Spanyol dengan radio Primaria. Di Kenya memulai dengan sekolah

korrespondensi tahun 1964. Republik Dominica tidak kalah dalam penggunaan radio untuk pendidikan sejak tahun 1964.

Efektifitas penggunaan media radio juga telah dilaporkan dari hasil survey Chu dan Schramm tahun 1967, oleh Forsythe tahun 1970, Jamison, Suppes dan Well tahun 1974 yang rata-rata berkesimpulan bahwa efektifitasnya terjamin (Jamison, 1978:28).

### **Perkembangan Pemanfaatannya di Indonesia**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan sebuah proyek yang diberi nama Proyek Teknologi Komunikasi Dasar (TKPD), yang merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sudah dimulai sejak awal tahun 1968, yaitu usaha-usaha penelitian yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan bantuan UNESCO dalam rangka mencari alternatif pemecahan masalah pendidikan di Indonesia. Laporan-laporan penelitian yang ada antara lain dari Emerson yang berjudul "*Education in Indonesia Diagnosis of the Present Situation with Identification of Priorities Development*" mengatakan bahwa program radio dan televisi merupakan bagian terpadu dari pengembangan materi dan kurikulum pendidikan, karena itu harus diberi prioritas.

Dari segi *cost and effectiveness analysis*, Jamison (1978) dari Stanford University melaporkan bahwa dengan *unit cost* yang tetap perbaikan sistem pendidikan dasar dapat dilakukan dengan media radio dan akan memperbesar rasio guru-murid.

Pada akhir 1971 diadakan eksperimen siaran radio pendidikan untuk keperluan penataran guru SD di Jawa Tengah, dan untuk peningkatan efektifitas pelajaran di SD dan SMP di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Irian Barat (Papua sekarang) dalam rangka FUNDWI untuk mencapai ijazah SPG bagi guru-guru SD (terkenal dengan KPG Udara). Program ini dievaluasi atas dasar jumlah lulusan ujian persamaan SPG yang cukup menggembirakan. Proyek Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM) yang lebih lanjut berkembang menjadi program Bahasa Indonesia untuk memperkenalkan metode SAS telah dilaksanakan di DKI Jakarta.

Pada tanggal 7 September 1973 telah diterbitkan Keputusan Bersama Ketua Badan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film, Departemen Penerangan, tentang Kerjasama Penyelenggaraan Eksperimen Siaran Pendidikan/Siaran Sekolah.

Untuk keperluan eksperimen telah diperoleh bantuan dari UNICEF berupa peralatan studio rekaman audio lengkap, peralatan kantor, kendaraan dan tiga ratus pesawat radio. Desain eksperimen untuk Jawa Tengah dibuat oleh IKIP Malang dan Daerah Istimewa Yogyakarta dibuat oleh IKIP Jakarta. Hasil evaluasi eksperimen di Jawa Tengah yang dilaksanakan IKIP Semarang pada tahun 1974, antara lain sebagai berikut.

1. Pengetahuan dan keterampilan tentang metodologi pengajaran modern menunjukkan angka rata-rata 54% (tujuan instruksional siaran).
2. Guru-guru di luar kota lebih bergairah dalam berpartisipasi dengan siaran radio pendidikan.
3. Lebih 73% (pada umumnya) guru-guru rajin mengikuti siaran radio pendidikan dan siaran tersebut mereka ikut dengan motivasi menambah pengetahuan.
4. Banyak guru SD dan SPG yang bukan dijadikan sampel, menyatakan mengikuti siaran atas kemauan sendiri. Bahkan Kabin PDPLB Magelang telah memperbanyak dan menyebar bahan penyerta siaran serta mengusahakan pembelian pesawat radio sendiri.

Hasil evaluasi tersebut dipandang cukup menggembirakan, sehingga pada tanggal 16 Februari 1977 siaran radio pendidikan dalam rangka penataran guru SD disebarkan ke sembilan propinsi di luar dua daerah persemiaan yang sudah ada, diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Semarang waktu itu.

Untuk keperluan penyebaran perintisan tersebut, diterbitkan Keputusan Bersama Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film, Depar-



temen Penerangan tentang Penyelenggaraan Siaran Pendidikan/Siaran Sekolah yang memperbaharui Keputusan Bersama yang sudah ada pada waktu eksperimen. Pada kesempatan yang sama diterbitkan Instruksi Bersama Ketua TIM Penyelenggaraan Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (TKPK), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktur Radio, Departemen Penerangan tentang Tugas dan Tanggung Jawab Fungsional dalam Penyelenggaraan Siaran Pendidikan/Siaran Sekolah. Hasil yang sudah dicapai Proyek TKPD selama ini antara lain sebagai berikut.

Tabel 1. Program Radio yang telah Dibuat dan Disiarkan

Tahun	Jumlah Program	Jumlah Bidang Studi
1977	261 program	5 bidang studi
1978	312 program	5 bidang studi
1979/1980	450 program	6 bidang studi
1980/1981	252 program	4 bidang studi
1981/1982	312 program	7 bidang studi
1983/1984	252 program	6 bidang studi
1984/1985	320 program	6 bidang studi
1985/1986	256 program	5 bidang studi
1986/1987	312 program	6 bidang studi
1987/1988	352 program	6 bidang studi
1988/1989	254 program	5 bidang studi
1989/1990	320 program	7 bidang studi
1990/1991	254 program	5 bidang studi
1991/1992	312 program	6 bidang studi
1992/1993	320 program	7 bidang studi
1993/1994	324 program	6 bidang studi
1994/1995	320 program	6 bidang studi
1996/1997	347 program	7 bidang studi
1997/1998	210 program	5 bidang studi
1999	226 program	6 bidang studi
2000	105 program	5 bidang studi
2001	125 program	4 bidang studi
2002	196 program	4 bidang studi
2003	50 program	2 bidang studi
2004	70 program	3 bidang studi
2005	60 program	2 bidang studi

Sumber: Laporan Pustekkom 1984-2005

Di samping program radio yang disiarkan, pendidikan melalui radio ini juga dilengkapi dengan bahan cetakan sebagai bahan pendamping yang disebut dengan Bahan Penyerta.

Sasaran yang dicapai dengan tahun anggaran 1982/1983  $\pm$  70.000 orang guru SD dan Madrasah Ibtidaiyah. Total target sampai dengan tahun 2000/2001 mencapai 1,2 juta guru SD. Menunjang program wajib belajar 9 tahun dengan program SMP Terbuka dan 10 propinsi uji coba untuk sasaran siswa SD.

### **Permasalahan Siaran radio Pendidikan**

Untuk membahas permasalahan yang ada dalam Proyek TKPD, terlebih dulu harus diketahui tujuan, komponen kegiatan, dan proses pelaksanaannya.

#### **1. Tujuan**

- a. Meningkatkan pengetahuan Guru SD dalam melaksanakan Kurikulum yang berlaku dengan cara penyampaian melalui media komunikasi, antara lain media radio, kaset, bahan penyerta siaran dan media pendidikan lainnya.
- b. Dapat diterimanya teknologi komunikasi secara terpadu dalam sistem pendidikan.

#### **2. Komponen Kegiatan**

Kegiatan TKPD mempunyai komponen kegiatan, yaitu: pengembangan program dan sistem penyajian, pembinaan hubungan kerja, dan pengadaan sarana dan fasilitas.

#### **3. Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Di samping penataran tatap muka yang dilaksanakan Tim Penatar Keliling Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada guru SD di Propinsi Irian Jaya, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (11 propinsi) diberikan penataran dengan menggunakan berbagai media yang terkenal dengan Siaran Radio Pendidikan (SRP).

SRP diberikan sebagai tindak lanjut dari penataran secara tatap muka, untuk memantapkan dan memperkaya bahan penataran. Lain dari pada itu diproduksi juga media yang diperlukan untuk alat bantu menatar. Program media yang disediakan oleh TKPD adalah: Media Radio yang dilengkapi dengan bahan penyerta siaran yang berupa bahan cetak bagi guru-guru SD di sebelas propinsi dan program slides suara dan kaset untuk membantu pelaksanaan penataran secara tatap muka. Penyiaran program dilakukan oleh 23 stasiun pemancar RRI, radio RPD dan 5 radio swasta niaga.

Guru-guru dalam sistem SRP mendengarkan radio, secara berkelompok di bawah supervisi Kepala SD di tempat mereka mengajar. Kepada pendengar diberikan bahan penyertaan siaran (a' 2 eksemplar tiap SD). Bahan penyerta ini memberikan informasi tentang program yang akan disiarkan pada saat yang telah ditentukan dalam jadwal. Informasi tersebut meliputi Tujuan Instruksional Khusus (TIK) yang akan dicapai, pokok isi siaran, petunjuk cara mendengarkan, buku-buku yang perlu dipelajari pendengar, follow up, dan sebagainya. Bahan penyerta juga memuat alat evaluasi untuk mengukur sampai di mana pendengar telah belajar dari program bersangkutan.

Program SRP dibuat berdasarkan kebutuhan Guru SD sebagai tercantum dalam kurikulum/silabi penataran tatap muka, serta kurikulum SD yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan pertama yang diselenggarakan adalah analisa kurikulum penataran tatap muka untuk menentukan pokok bahasan yang perlu dibuat program medianya. Lebih lanjut ditentukan tujuan instruksional khusus dari program media yang telah diidentifikasi, dilengkapi dengan garis besar isi program serta cara penyajiannya. Bahan-bahan ini semua akan menjadi dasar penulisan naskah bahan penyerta siaran, naskah program radio, dan naskah program lainnya. Agar program siaran radio lebih efektif perlu disertai dengan mekanisme umpan balik yang teratur. Umpan balik dari guru ke pusat penyiaran dapat

diperoleh secara tertulis maupun melalui petugas khusus yang secara periodik meninjau lapangan. Jawaban umpan balik dari pusat penyiaran kepada guru dapat disampaikan melalui program siaran radio yang diproduksi dan disiarkan melalui program siaran radio yang diproduksi dan disiarkan secara lokal, baik melalui radio swasta maupun RRI. Program selanjutnya dikembangkan untuk segmen pendengar siswa SD dan SMP Terbuka.

### Masalah yang Dihadapi

Masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program SRP sebagai berikut.

1. Distribusi program dan bahan-bahan lainnya sering mengalami keterlambatan untuk dapat sampai ke tempat tujuan, khususnya ke daerah-daerah terpencil.
2. Penerimaan program siaran seringkali mengalami gangguan cuaca, sehingga kurang dapat diikuti dengan jelas oleh peserta.
3. Karena media radio merupakan media komunikasi massa satu arah, interaksi yang ada sangat terbatas antara para peserta dengan para penatar, walaupun telah diusahakan adanya mekanisme *feedback* (umpan balik).
4. Jam siaran sering bersamaan dengan jam pelajaran sekolah.
5. Mekanisme kerja sama dengan lembaga penyiaran dan lembaga lain saat ini sudah tidak berlaku lagi seiring dengan perubahan tatanan pemerintahan otonom. Oleh karena itu, saat ini tidak ada lagi stasiun radio baik swasta maupun RRI yang menyiarkan siaran radio pendidikan.

Manajemen pemerintahan telah berubah, dari sentralistik ke otonom. Perubahan itu tidak sekedar istilah namun diikuti oleh pola anggaran yang tertuang dalam undang-undang. Masalah-masalah pemerataan pendidikan, kualitas dan sebagainya yang selama ini ada ditangani dengan melibatkan berbagai lembaga dengan maksud permasalahan dapat diselesaikan secara komprehensif dan mendasar. Namun, sejalan dengan perubahan tatanan pemerintahan yang

otonom, bentuk-bentuk kerjasama antarlembaga yang dahulu bersifat nasional, kini telah berubah. Dalam pemerintahan daerah yang otonom, daerah-daerah tidak dapat lagi dianggap seragam dalam semua urusan dan masalah. Setiap daerah memiliki kelebihan dan sekaligus kekurangan. Satu daerah tertentu sumber daya alamnya melimpah namun mungkin SDM-nya kurang. Mungkin juga daerah lain baik SDA-nya, namun SDM-nya kurang, dan sebagainya.

Perubahan mendasar yang terjadi di dalam struktur dan peran birokrasi meliputi banyak aspek. Perubahan itu meliputi visi, misi, tujuan, struktur, jenis, jumlah, sifat atau orientasinya, dan sebagainya. Sebuah organisasi yang semula bersifat *public service* kini bisa saja berubah semi *profit*.

Salah satu hal yang terkena dampak perubahan dalam struktur birokrasi adalah siaran radio pendidikan yang dikelola oleh Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Depdiknas). Pada waktu itu, bekerja sama dengan Deppen, Dikgubentis, Universitas Terbuka, dan Dikdasmen. Deppen terkena *review*, dan krisis berkepanjangan yang menimpa keuangan telah memaksa negara melakukan reorientasi dan restrukturisasi birokrasi melalui *banishing bureaucracy* untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan.

## Penutup

Perubahan itu sesuatu yang sengaja diinginkan, jadi bukan merupakan suatu hal yang harus disesali. Perubahan itu sebuah *planned change*, perubahan yang direncanakan. Otonomi memberi kesempatan bersaing antardaerah, termasuk dalam hal pengembangan SDM melalui pendidikan. Pemanfaatan media pendidikan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar sebagai sebuah proses komunikasi, bahkan mampu berperan sebagai pengganti guru jika dipersiapkan dengan cermat. Merosotnya pemanfaatan siaran media radio pendidikan terjadi seiring dengan perubahan organisasi birokrasi pada umumnya. Siaran radio pendidikan yang pernah populer pada waktu lalu

dapat dimengerti bahwa keberhasilan itu banyak digerakkan oleh kekuatan kebijakan pemerintah. Di samping itu, program-program yang didesain untuk program pendidikan jarak jauh atau pendidikan terbuka.

Hal yang penting diperhatikan dengan perubahan struktur organisasi saat ini dalam kaitannya dengan pengembangan dan pemanfaatan media radio adalah pentingnya memahami perubahan perspektif birokrasi, yaitu dengan mengikuti irama perubahan itu sendiri. Ada beberapa saran yang dapat ditempuh berdasarkan analisa dan identifikasi masalah tadi, yaitu: membuat rencana strategis dengan melibatkan *stake holder*, mengembangkan varian produk, membentuk organisasi yang dinamis, meningkatkan profesionalisme SDM, mengembangkan *costumer* baru, dan aktif melakukan promosi.

### **Daftar Pustaka**

- Anderson, R. H. 1983. (Terjemahan). *Pemilihan dan Pengembangan Media untuk Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali.
- Jamison, D. T., McAnany, E. G. 1978. *Radio for Education and Development*. Beverly Hills, California: Sage.
- Karim, A. G. 2003. *Kompleksitas Permasalahan Otoda di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.
- Sadiman, A. S. 1986. *Media Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Suhedi. 1984. *Laporan Perkembangan Proyek TKPD*. Jakarta: Pustekkom.
- Wasistiono, S. 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Fokus Media.
- Yusufhadimiarso, dkk. 1984. *Teknologi Komunikasi Pendidikan*. Jakarta: Pustekkom.